

Judul : Agar Tidak Krisis, BANGUN SISTEM MITIGASI ENERGI
Tanggal : Jumat, 11 Juni 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Agar Tidak Krisis

Bangun Sistem Mitigasi Energi

ANGGOTA Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris mendorong Dewan Energi Nasional (DEN) membangun sistem mitigasi kondisi energi yang kuat di lingkungan Pemerintahan maupun Badan Usaha. Upaya ini perlu, agar tidak terjadi krisis energi.

"Sistem mitigasi tersebut perlu dikembangkan, mengingat kondisi geografi Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau," tutur Andi, dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan belum lama ini.

Dia pun meminta DEN melakukan pembimbingan dan pembinaan ke pemerintah daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah (perda) Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sesuai amanat Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi. Dalam undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyusun Perda RUED Provinsi.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong agar peta jalan energi nasional memperhatikan risiko keuangan negara. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat menerima kunjungan kerja Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan melalui konferensi video, pada Rabu (2/6).

Pertemuan secara virtual ini dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri, Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman, Yusra Khan, Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto, dan lainnya.

Sri Mulyani mengatakan, energi tidak mungkin dikelola hanya satu Kementerian/Lembaga (K/L) namun banyak yang terlibat, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda). Karena isu energi, jelasnya, multidimensi. Antara lain, bagaimana

pemenuhan akses energi untuk masyarakat Indonesia.

"Lalu akses energi dapat memberikan layanan yang baik pada pendidikan dan kesehatan untuk kemajuan bangsa dan negara," kata Sri.

Dia juga berharap, DEN dapat memikirkan secara detail strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai bauran energi nasional khususnya energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Anggota DEN Satya Widya Yudha menyampaikan, DEN butuh dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam penyusunan peta jalan pengelolaan energi ke depan. Hal ini sebagai arah pemerintah dan bentuk komitmen dalam kancah global. "Peta jalan tersebut bersifat multisektoral, perlu dukungan Kemenkeu," kata Satya.

Dia menjelaskan, DEN ikut mendorong agar subsidi energi bisa tepat sasaran diperlukan mekanisme penyatuan data masyarakat yang berhak disubsidi. "Untuk ini Kemenkeu tidak bisa sendirian. Perlu kerja multisektor yang juga menjadi tugas DEN," tambah dia.

Hal senada dilontarkan kolega Satya di DEN, Herman Darnel. Herman menilai dukungan dari Menteri Keuangan terhadap transisi energi dan pengalokasian anggaran pada DEN sangat dibutuhkan. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendatangkan nilai tambah dalam kurun waktu jangka panjang.

Adapun kunjungan kerja Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) DEN 2021-2025, khususnya terkait dengan kebijakan lintas sektoral Kementerian Keuangan dalam mencapai target bauran energi nasional. ■ KAL